

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan luar negeri Qatar dari sebuah negara satelit yang berada di bawah protektorat *de facto* Arab Saudi menjadi aktor global yang independen dan proaktif merupakan produk nyata dari faktor idiosinkratik Syeikh Hamad. Dia sendiri menjadi sosok kunci di balik seluruh proses transformasi negara tersebut melalui latar belakang pribadi yang unik; lahir di lingkungan tradisional Badui namun menempuh pendidikan militer di Sandhurst. Perpaduan ini membentuk disiplin strategis serta visi militer yang kuat, yang kemudian beliau terapkan saat menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan. Latar belakang ini diperkuat melalui pernikahan strategis beliau dengan Syeikhah Moza binti Nasser, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan kekeluargaan, tetapi juga sebagai manuver politik cerdas untuk menjauhkan pengaruh klan pro-Saudi dari lingkaran kekuasaan sekaligus mendorong agenda reformasi modernisasi yang progresif di Qatar guna melawan arus konservatisme.

Visi pembaruan ini mencapai titik baliknya yang paling krusial saat beliau naik takhta sebagai Amir Qatar melalui kudeta tidak berdarah pada 27 Juni 1995. Langkah berani ini diambil dengan tujuan utama mengakhiri stagnasi ekonomi dan ketergantungan keamanan mutlak terhadap patronase regional yang selama ini membelenggu Qatar. Kebijakan luar negeri menjadi aspek yang sangat diandalkan oleh Syeikh Hamad untuk meningkatkan peran dan pengaruh Qatar di panggung global. Dalam praktiknya, Syeikh Hamad menciptakan suatu pola hubungan yang sangat unik antara keamirannya dengan Ikhwanul Muslimin tanpa serta merta menjadikan Qatar sebagai 'Negara IM'. Di satu sisi, Qatar tetap mempertahankan paham Wahhabisme yang merupakan aliran Islam bercorak konservatif sebagai landasan bernegara, namun di sisi lain, di Qatar telah dipengaruhi secara mendalam oleh pemikiran aktivisme Ikhwanul Muslimin yang lebih moderat dan demokratis. Formulasi inilah yang pada gilirannya menciptakan satu pandangan yang moderat dan akomodatif dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Qatar yang mandiri.

Melalui kerja samanya dengan Ikhwanul Muslimin, Qatar memiliki daya tawar yang besar di kawasan sebagai langkah strategis untuk membebaskan diri dari pengaruh Arab Saudi, khususnya setelah terungkapnya rencana kudeta balasan terhadap Syeikh Hamad. Dukungan Qatar terhadap aktivitas politik Ikhwanul Muslimin dan perlawanan bersenjata Hamas untuk mengusir penjajah Israel menjadi instrumen penting untuk meningkatkan

pengaruh diplomatik serta posisi tawar di kawasan Timur Tengah. Puncak dari komitmen ini dibuktikan secara nyata melalui kunjungan bersejarah tahun 2012 ke Jalur Gaza, pusat aktivitas pemerintahan Hamas, di tengah ketegangan politik regional. Langkah ini secara praktis memberikan dukungan finansial senilai US\$400 juta sekaligus pemberian legitimasi *de facto* kepada pemerintahan Hamas.

Seluruh tindakan berani dan kebijakan luar negeri yang otonom tersebut berakar dari profil kepribadian politik Syeikh Hamad yang dikategorikan sebagai tipe narsistik. Hal ini ditandai dengan kebutuhan tinggi akan pengakuan internasional serta keyakinan kuat atas kemampuannya dalam mengendalikan peristiwa global. Profil tersebut membentuk gaya pengambilan keputusan beliau yang bersifat situasional, sehingga memungkinkannya memproses ancaman serta peluang di kawasan secara mandiri tanpa harus tunduk pada tekanan negara besar di sekitarnya. Guna menjamin keberlangsungan visi tersebut, beliau menjalankan gaya kepemimpinan direktif yang dominan agar ambisi pembaruan dan kedaulatan pribadinya terdistribusi secara efektif dalam birokrasi negara. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh faktor idiosinkratik kepemimpinan Syeikh Hamad yang cenderung menolak kendala sistemik merupakan determinan utama yang mampu melampaui batasan struktural internasional, membuktikan bahwa seorang pemimpin dengan visi yang kuat dapat mengubah nasib negara kecil menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, terdapat beberapa saran strategis sebagai tindak lanjut bagi perkembangan studi kebijakan luar negeri ke depan. Pertama, dari sisi metodologi, penelitian ini sangat bergantung pada sumber data sekunder melalui studi literatur dan dokumen publik. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya sangat direkomendasikan untuk melakukan pendekatan penelitian lapangan di Doha guna mendapatkan data primer melalui wawancara mendalam dengan para diplomat senior atau mantan pejabat di lingkungan Majlis Amir. Hal ini sangat penting untuk membedah dinamika pengambilan keputusan di Qatar yang sering kali bersifat tertutup dan personalistik, sehingga dapat memberikan validasi empiris yang lebih kuat terhadap profil psikologis pemimpin yang selama ini hanya dianalisis melalui perilaku kebijakan luarnya.

Kedua, secara tematik, disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai kesinambungan faktor idiosinkratik antara era Syeikh Hamad dengan putra mahkotanya, Syeikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Fokus penelitian dapat diarahkan pada apakah

warisan karakter independen yang diletakkan oleh Syeikh Hamad tetap dipertahankan secara konsisten atau telah mengalami adaptasi praktis pasca-peristiwa blokade Teluk 2017-2021. Mengingat Syeikh Tamim dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, akan sangat menarik untuk melihat apakah gaya kepemimpinan yang semula bersifat direktif dan menantang kendala telah bergeser menjadi lebih moderat atau justru semakin mempertahankan nilai-nilai konservatif sebagai respons terhadap perubahan konstelasi politik global di Timur Tengah. Analisis mengenai bagaimana transisi kekuasaan dalam sistem monarki absolut memengaruhi keberlanjutan dukungan terhadap aktor-aktor di Palestina juga akan menjadi kontribusi akademis yang signifikan.

Ketiga, bagi khalayak umum dan praktisi kebijakan, penelitian ini memberikan saran agar dalam merumuskan strategi diplomasi dengan negara-negara monarki di Timur Tengah, tidak hanya fokus pada kepentingan nasional negara tersebut secara abstrak, tetapi juga harus mempertimbangkan profil kepribadian dan latar belakang psikobiografi pemimpinnya. Memahami variabel individu seperti tingkat narsisme politik atau kecenderungan pencarian prestise dapat membantu para diplomat internasional dalam merancang pendekatan negosiasi yang lebih akurat dan efektif. Selain itu, bagi akademisi Hubungan Internasional, disarankan untuk memperluas penggunaan teori idiosinkratik dalam menganalisis fenomena *small state diplomacy*, karena terbukti bahwa keterbatasan geografis dan sistemik dapat dilampaui oleh kekuatan visi personal pimpinan yang kuat. Dengan demikian, studi mengenai peran individu harus kembali ditempatkan sebagai arus utama dalam analisis kebijakan luar negeri kontemporer, terutama di kawasan tempat sentralisasi kekuasaan masih sangat dominan.